

2024

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN**

**BADAN PENDAPATAN
KAB.KUTAI
KARTANEgara**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Bapenda 2024 ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Bapenda 2024 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Bapenda 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Dokumen Rencana Kerja Bapenda 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bapenda 2024 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartan Tenggarong,

Tenggarong Agustus 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.....	4
2.2. Ananlisis Kinerja Pelayanan PD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
4.1. Program dan Kegiatan	36
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen rancangan awal perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan PAD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan Perubahan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami Perubahan Pelaksanaan pekerjaan, Target kinerja serta Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
5. Mendukung prioritas Bupati Kutai Kartanegara pada Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun ke-empat Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dimana proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan Perubahan Rancangan RKPD 2024. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator program, kegiatan dan pagu indikatif Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan menilai capaian realisasi indikator program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Secara umum rata-rata capaian fisik realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai 90% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp.58.656.497.368,- atau 92,53% dari Pagu Bapenda sebesar Rp.63.389.1432.244,-

Dengan rincian capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah belum memenuhi target kinerja yang ada pada dokumen Renstra dikarenakan penetapan target yang

terlalu tinggi (100%),sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.58.656.497.368,- atau 92.3% dari pagu sebesar Rp.63.389.143.244,-

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat telah memenuhi target dengan capaian target untuk 2023 sebesar 166% dari target 95,78% serta realisasi keuangan sebesar 94.4% atau Rp.670.861.651,- dari pagu sebesar Rp.711.000.000,-

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah telah memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.620.846.251,- atau 93,5% dari pagu Rp.8.150.000,- Tercapainya target kinerja program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah disebabkan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Review hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daeah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 terlampir dalam format tabel berikut (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2024)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2024)	TINGKA T REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								</		

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	1	Dokumen	12 Dokumen	3,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	2	2	4 Dokumen	2,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1	1	3 Dokumen	3,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	100	100	200 Persen	2,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	283 Orang	14 Bulan	283 Orang	283 Orang	1	280	577 Orang	2,04

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	2	5 Laporan	5,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	1	12	36 Laporan	3,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Persen	0 Persen			100 Persen	1,00
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	0	4	12 Laporan	3,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00

			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	238 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	0 Dokumen	0	11	33 Dokumen	0,14
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0	30	90 Orang	3,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	0 Paket	0	30	90 Paket	3,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	4.054 Paket	4.000 Paket	0 Paket	0	4.000	12.054 Paket	2,97
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	0 Paket	0	40	120 Paket	3,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan	0 Laporan	0	1.000	3.000 Laporan	3,00

			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Laporan	0 Dokumen	0	1.000	3.000 Dokumen	3,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 Persen	0 persen	0	100	300 persen	3,00
			Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0		2 unit	2,00
			Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	30 unit	20 unit	0 unit	0	20	70 unit	4,67
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0	1	3 unit	3,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0		160 Persen	2,00
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	0 Laporan	0	25	75 Laporan	3,00
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0	12	36 Laporan	3,00

			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0	4	10 Laporan	5,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	58 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0	12	82 Laporan	1,41
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0	100	300 Persen	3,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	0 unit	0	6	18 unit	3,00
			Pemeliharaan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	100 unit	50 unit	0 unit	0	50	200 unit	2,00
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	0 unit	0	5	15 unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	29 persen	27.65 persen	50 persen	0 persen	0	50	50 persen	1,70

			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang Lapor	52.812 WP	60.451 WP	68.750 WP	0 WP	0	68.750	197.951 WP	3,75
				Jumlah WP	180.000 WP	199.697 WP	137.500 WP	0 WP	0	137.500	474.697 WP	2,64
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	5 Dokumen	5,00
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	3	7 Dokumen	7,00
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0	5	13 Laporan	4,33
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	3.746 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	2	3.750 Laporan	1,00
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	180.000 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0	3	180.006 Laporan	1,00
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	0 Objek Pajak	0	160.000	480.000 Objek Pajak	3,00

			Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	11.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	11.004 Dokumen	1,00
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	7.491 Layanan	7.491 Layanan	0 Layanan	0	7.491	22.473 Layanan	3,00
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	180.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	180.004 Dokumen	1,00
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	1.004 Dokumen	1,00
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	80 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	84 Kasus	1,05
			Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	3	106 Wajib pajak	1,06
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	100 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	2	104 Laporan	1,04
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1	3 Unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	95 Persen	96 Persen	95 Persen	0 Persen	0	95.48	96 Persen	1,00

			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	1.847 Triliun Rupiah	2.272 Triliun Rupiah	2.112 Triliun Rupiah	0 Triliun Rupiah	0	2.112	6.496 Triliun Rupiah	3,52
				Realisasi penerimaan DBH Pusat	1.937 Triliun Rupiah	2.372 Triliun Rupiah	2.212 Triliun Rupiah	0 Triliun Rupiah	0	2.212	6.796 Triliun Rupiah	3,51
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	0 Laporan	0	1	3 Laporan	3,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan selama tahun 2024.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah sesuai dengan Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 sesuai dengan Tabel terlampir (Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Pajak Daerah			7,52%	8,43%	9,66%	11,33%	7,52%	24,13%	24,13%	24,13%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah menemukan kendala dan hambatan-hambatan untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali
- b. Kurangnya koordinasi Pemungutan Pajak
- c. Kondisi Geografis yang luas
- d. Hilangnya potensi Pajak Daerah
- e. Kunjungan wisata ke Kutai Kartanegara tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Review terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal PRKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel T-C.31)

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

N O	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50.111.137.316	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	66.550.408.320	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen	500.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen	466.380.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	300.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		66.380.400,00	Pagu sebesar Rp.33.620.000 dialihkan ke pengadaan kotak arsip
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.523.642.955,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	31.340.331.853		BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 orang	37.071.882.955	Pagu sesuai catatan dari tim Anggaran BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	80.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	371.760.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				250.000.000					0	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah				250.000.000					0	Pagu dialihkan ke Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sub.keg Penetapan Wajib Pajak Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.300.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.141.403.008	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	356.622.410	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	500.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	314.240.598	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	344.000.000	180.000.000 di geser ke bahan bacaan(pokir),144.000.000 pergeseran dari perencanaan dokumen dan rehab utk Pengadaan Kotak Arsip

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0					180.000.000	Sub.kegiatan baru (pokir)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	2.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	1.846.540.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.474.069.034	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		5.350.000.000					5.660.054.000	Penambahan pengadaan 3 unit AC standing 5PK dan Printer 20 buah

	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	4.000.000.000	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.814.015.034	pagu sebesar Rp.325.338.738 sebesar di geser ke sub.keg.penyediaan sarana prasarana pajak daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.051.566.284	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.561.868.823	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000.000	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	960.362.347	
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.391.566.284	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.391.506.476	pagu sebesar Rp380.704.668 di geser ke sub.keg penyediaan sarana prasarana pajak daerah

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				7.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.833.044.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	620.970.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	621.800.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	6.000.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	5.590.274.100	Rp.142.600.000 (pengadaan printer) 167.394.000 (pengadaan AC Stand) di geser ke pengadaan peralatan dan mesin kantor (pengadaan printer)110.380.000 geser(pengadaan kotak arsip) Rp.59.462.332 Sapras pajak Rp.17.026.168 ke penyediaan listrik

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	5.175.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	7.461.786.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Lapor	68.750 WP	5.175.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Lapor	68.750 WP	7.461.786.000	
			Jumlah WP	137.500 WP				Jumlah WP	137.500 WP		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	500.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pajak, Dokumen Perubahan Perencanaan Pajak dan pelaksanaan Workshop/Pelatihan terkait Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	500.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	500.000.000	
	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	250.000.000	Sub.Kegiatan baru
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	

	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	500.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	500.000.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	
	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	Pengendalian,Pe meriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	300.000.000	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	1.336.786.000	Pengembangan Lanjutan ESISMIOP dan Pembuatan Aplikasi Mobile APP versi IOS dan Android (282.150.000) Pengembangan Lanjutan EBPHTB dan Pembuatan Aplikasi Mobile APP versi IOS dan Android (282.150.000) Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIAPDA(225.720.000) Pembuatan Aplikasi E Porporasi (250.000.000)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat		611.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat		611.000.000	
			Realisasi Penerimaan DBH Pusat					Realisasi Penerimaan DBH Pusat			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	95,78 Persen	611.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	95,78 Persen	611.000.000	
	Jumlah				55.897.137.316					74.623.194.320	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat kabupaten.

Rancangan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kartanegara tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi maupun Perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, berpihak pada pekerjaan, berpihak pada kaum miskin, dan berpihak pada lingkungan;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:

1. Layak secara ekonomi, dengan ciri:
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Diterima secara sosial, dengan ciri:
 - a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;
 - d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Mendorong keharmonisan masyarakat;
 - g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.

3. Berkelanjutan secara ekonomi, dengan ciri:
 - a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi;
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2022-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Ada pun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kemandirian fiskal Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan kegiatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana strategis. Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam draf Renstra BAPENDA adalah :“ **Menuju Kemandirian Fiskal Daerah melalui Data Tarik Investasi** ”

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 44 sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sesuai tabel terlampir (Tabel T-C.33)

Tabel (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BAPENDA	100%	59.082.597.316			100%	44.736.297.941
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	BAPENDA	100%	500.000.000			100%	500.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	2 Dokumen	250.000.000	APBD		2 Dokumen	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BAPENDA		31.209.571.032	APBD			34.703.842.138

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	238 Orang	30.829.571.032	APBD		330 Orang	34.373.842.138
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	2 Laporan	80.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	1 Laporan	300.000.000	APBD		15 Orang	250.000.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	1 Laporan		APBD		1 Laporan	40.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		BAPENDA		200.000.000	APBD			100.000.000
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	4 Dokumen	200.000.000	APBD		4 Dokumen	100.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BAPENDA		350.000.000	APBD			200.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	11 Dokumen	100.000.000	APBD		11 Dokumen	100.000.000

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	30 Orang	250.000.000	APBD		30 Orang	100.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		BAPENDA		3.300.000.000	APBD			2.800.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	30 Paket	500.000.000	APBD		30 Paket	200.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA	Dokumen		APBD		Dokumen	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4.054 Paket	500.000.000	APBD		4.054 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	45 Paket	200.000.000	APBD		45 Paket	200.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	1.000 Paket	2.000.000.000	APBD		1.000 Paket	2.000.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	1.000 Dokumen	100.000.000	APBD		1000 Dokumen	100.000.000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BAPENDA		12.971.460.000	APBD			3.230.889.519
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 Unit	4.000.000.000	APBD		1 Unit	3.030.889.519
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 Unit	8.971.460.000	APBD		1 Unit	200.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BAPENDA		3.051.566.284	APBD			2.501.566.284
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA	25 Laporan	10.000.000	APBD		25 Laporan	10.000.000
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 Laporan	1.500.000.000	APBD		12 Laporan	1.000.000.000
			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	3 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	58 Laporan	1.391.566.284	APBD		58 Laporan	1.391.566.284

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		BAPENDA		7.500.000.000	APBD			700.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	6 Unit	500.000.000	APBD		6 Unit	200.000.000
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA			APBD			100.000.000
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA	100 Unit	1.000.000.000	APBD		100 Unit	200.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	5 unit	6.000.000.000	APBD		5 unit	200.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BAPENDA		5.175.000.000,00	APBD			4.875.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BAPENDA		5.175.000.000,00	APBD			4.875.000.000,00
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	2 Dokumen	500.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000

			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	3 Laporan	675.000.000	APBD		3 Laporan	675.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	3.746 Laporan	500.000.000	APBD		3.746 Laporan	500.000.000
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	180.000 Laporan	400.000.000	APBD		180.000 Laporan	400.000.000
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	160.000 Objek pajak	500.000.000	APBD		160.000 Objek pajak	500.000.000
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	11.000 Dokumen	250.000.000	APBD		11.000 Dokumen	250.000.000

			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	7.491 Layanan	200.000.000	APBD		7.491 Layanan	200.000.000
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	180.000 Dokumen	250.000.000	APBD		180.000 Dokumen	250.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	1.000 Dokumen	500.000.000	APBD		1.000 Dokumen	500.000.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Dokumen	350.000.000	APBD		80 Dokumen	350.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	100 Dokumen	200.000.000	APBD		100 Dokumen	200.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	100 Laporan	150.000.000	APBD		100 Laporan	150.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak	BAPENDA	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				611.000.000				611.000.000

			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	BAPENDA			APBD			
				Realisasi Penerimaan DBH Pusat							
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	BAPENDA	95,78%	611.000.000	APBD		95,78%	611.000.000
			Jumlah				64.868.597.316				50.222.297.941

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rancangan Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rancangan Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tenggarong, Agustus 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.PT., MP

Pembina Utama Muda